

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN
CALON TUNGGAL TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 100/PUU-XIII/2015 DITINJAU DARI HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
UNTUK MEMILIH**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat Memperoleh
Derajat Sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

Rizqiawan Wisnu Praditomo

E0012340

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

com2016 user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN
CALON TUNGGAL TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 100/PUU-XIII/2015 DITINJAU DARI HAK**

KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

UNTUK MEMILIH

Oleh :

Rizqiawan Wisnu Praditomo

NIM : E0012340

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 7 April 2016

Dosen Pembimbing Skripsi I



Maria Madalina, S.H., M.Hum.

NIP. 19601024 198602 2002

Dosen Pembimbing Skripsi II



Adriana G Firdausy S.H., M.H.

NIP. 19810721 200501 2003

commit to user

**PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN
CALON TUNGGAL TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 100/PUU-XIII/2015 DITINJAU DARI HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

UNTUK MEMILIH

Oleh:

Rizqiawan Wisnu Praditomo

E0012340

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 2 Mei 2016

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Isharyanto, S.H.,M.Hum
NIP. 197805012003121002
Ketua
2. Adriana Grahani Firdausy, S.H.,M.H
NIP. 198107212005012003
Sekretaris
3. Maria Madalina, S.H.,M.Hum
NIP. 196010241986022002
Anggota

(.....)

(.....)

(.....)



Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum
NIP. 19601107198601100

commit to user

PERNYATAAN

Nama : Rizqiawan Wisnu Praditomo

NIM : E0012340

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 DITINJAU DARI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citas* dan ditunjukan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 7 April 2016
yang membuat pernyataan



Rizqiawan Wisnu Praditomo
NIM. E0012132

Abstrak

Rizqiawan Wisnu Praditomo, E0012340, 2016. ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 DITINJAU DARI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal terkait putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari hak konstitusional warga negara untuk memilih. Dalam penulisan ini penulis akan memecahkan masalah mengenai mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dan menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala daerah ditinjau dari pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih.

Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Hasil pembahasan menjelaskan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terdapat mekanisme yang baru dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal yaitu dengan memilih “setuju” ataupun “tidak setuju” terhadap calon tunggal kepala daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut bertujuan untuk memenuhi hak konstitusional warga negara untuk memilih.

Kata Kunci: pemilihan kepala daerah, calon tunggal, hak konstitusional

Abstract

Rizqiawan Wisnu Praditomo, E0012340, 2016. ANALYSIS OF REGIONAL ELECTION WITH SINGLE CANDIDATES RELATED CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 100 / PUU - XIII / 2015 BASED ON CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS TO CHOOSE.

This research aims to find out how the implementation of the local elections with a single candidate against the order of the Constitutional Court in terms of the constitutional rights of citizens to vote. In this study the authors will solve the problem of the mechanism of implementation of the local elections with a single candidate and analyze the implementation of the local elections in terms of the fulfillment of the constitutional rights of citizens to vote.

This research is a normative legal or commonly called the doctrinal legal research done by researching library materials or secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Primary legal materials consist of legislation, notes the official records, the minutes in the making of legislation and the decision of the judge's decision. As for the secondary law in the form of all the publicity about the law which is not an official documents.

The results of research and discussion explain that after the decision of the Constitutional Court Number 100 / PUU-XIII / 2015 there is a new mechanism in the local elections with a single candidate by selecting "agree" or "disagree" on a single candidate head area. Implementation of the local elections aim to meet the constitutional rights of citizens.

Keywords: local elections, a single candidate, the constitutional rights

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu”

-Q.S Al Insyirah : 6-8-



PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk keluarga tercinta:

Ibuk, Almarhum Bapak, Eyang, Adik, Budhe, Pakdhe, Om, Tante, dan Sepupu-Sepupu Penulis.



commit to user

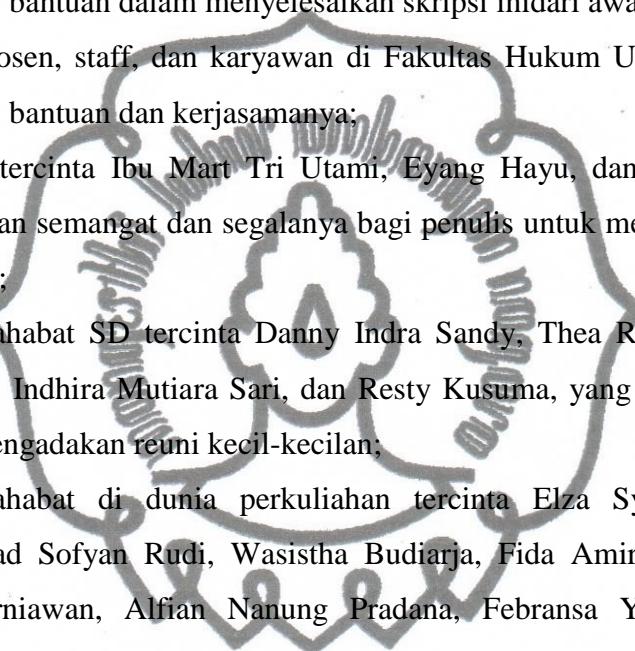
KATA PENGANTAR

Dengan diawali Bismillah, penulis panjatkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 DITINJAU DARI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH”**. Penulisan hukum ini diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum ini membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Penulisan ini menekankan pada mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dimana penulis menemukan beberapa permasalahan yaitu terdapat mekanisme yang baru dalam pemilihan kepala daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Dalam hal ini penulis akan menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal ditinjau dari pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat menambah pengetahuan penulis dikemudian hari. Penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati perlu mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Suranto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

- 
3. Maria Madalina, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I penulis yang senantiasa membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
 4. Adriana Grahani Firdausy, S.H., M.H. selaku pembimbing II penulis yang senantiasa membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
 5. Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik penulis;
 6. Pengelola Penulisan Hukum Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir;
 7. Seluruh dosen, staff, dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas bantuan dan kerjasamanya;
 8. Keluarga tercinta Ibu Marti Utami, Eyang Hayu, dan Adik Sari, yang memberikan semangat dan segalanya bagi penulis untuk menyusun penulisan hukum ini;
 9. Sahabat-sahabat SD tercinta Danny Indra Sandy, Thea Rizki Asa, Ferinda Wijayanti, Indhira Mutiara Sari, dan Resty Kusuma, yang selalu bersenang-senang mengadakan reuni kecil-kecilan;
 10. Sahabat-sahabat di dunia perkuliahan tercinta Elza Sylvania Pittaloka, Muhammad Sofyan Rudi, Wasistha Budiarja, Fida Amira, Kurnia Rheza, Arga Kurniawan, Alfian Nanung Pradana, Febransa Yoandala, Fredyta Prehantoro, Lek Harni dan Tri Yuliani yang selalu memberi semangat dan canda-tawa kepada penulis;
 11. Sahabat Griya Maleo tercinta Alfian Nofandhi, Afrizal Novandana, Ervan Widjanarko, Andrey Kurniawan, Naufal Muzakki, Wayan Arga, Fajar Nugrahadi, dan Dimas Febrian yang selalu mengajak penulis untuk bermain futsal dan berlibur sejenak melupakan keluh kesah dunia perkuliahan;
 12. Teman-teman Fakultas Hukum UNS Angkatan 2012 yang memberikan banyak pengalaman dan kenangan indah di masa perkuliahan;
 13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

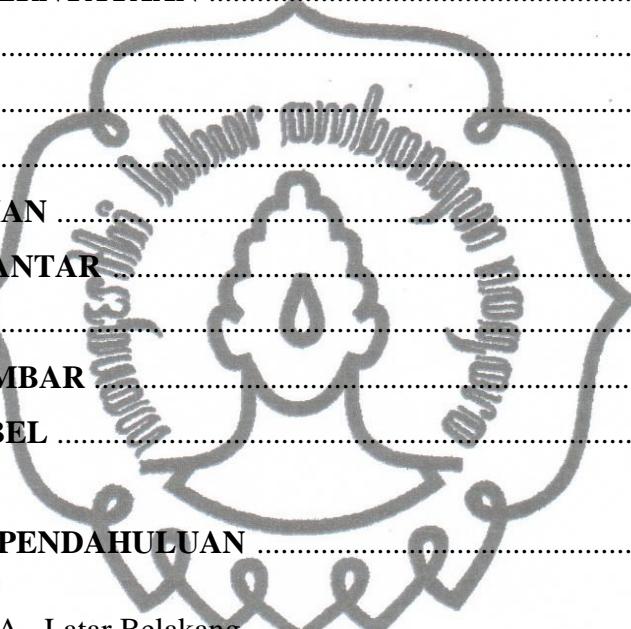
Surakarta, 7 April 2016

Penulis

Rizqiawan Wisnu Praditomo



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Hukum	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teori	15
1. Pemilihan Kepala Daerah	15
2. Calon Kepala Daerah	20
3. Mahkamah Konstitusi	31
4. Hak Konstitusional o user	37

5.	Hak Memilih.....	42
B.	Kerangka Pemikiran	46
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A.	Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.....	49
B.	Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal Ditinjau Dari Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Memilih.....	67
BAB IV	PENUTUP	85
A.	Simpulan	85
B.	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran	46
Gambar 3.1 Model Surat Suara	60
Gambar 3.2 Surat Suara Sah	62
Gambar 3.3 Surat Suara Tidak Sah	63



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah di Daerah yang memiliki Calon Tunggal	80
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

